Laporan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Triwulan I
Tahun 2025



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatNya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan I Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan I merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan I Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan disampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan I. Semoga laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan I Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat digunakan sebagai acuan dan perbaikan bagi kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dimasa yang akan datang.

Nganjuk, Maret 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

HARIS JATMIKO, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19711219 199803 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 3

1.4. Sistematika Penulisan..... 3

1.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah..... 4

BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TRIWULAN I TAHUN 2025

II.1.Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 7

II.2.Analisis Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran..... 7

II.3.Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah..... 9

II.4. Analisis Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 21

II.5. Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I..... 32

II.6. Analisis Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025..... 52

BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 64

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah..... 65

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan..... 75

IV.2. Tindak lanjut..... 76

BAB I
PENDAHULUAN

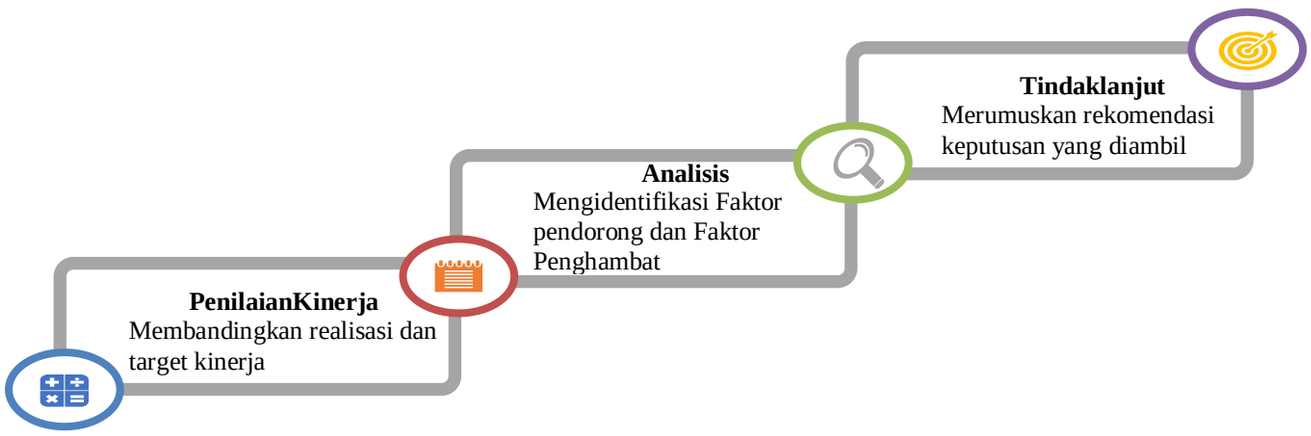
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan Pilihan Industri dan Perdagangan, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai triwulan I melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten NganjukTahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN,
   Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gapanalysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

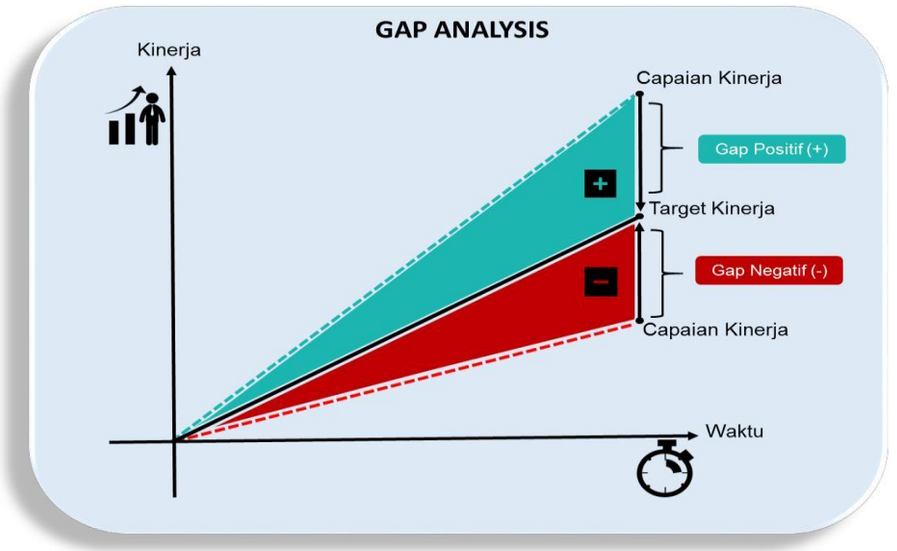
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥91%	Sangat Tinggi
2.	76%≤90%	Tinggi
3.	66%≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja.*Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2.*GapAnalysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



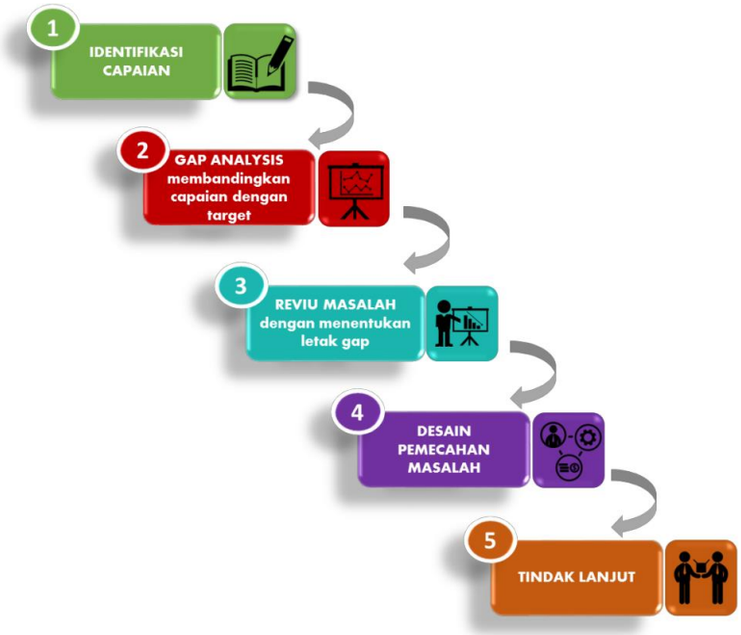
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-).*Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap*akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gapanalysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *uptodate*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TRIWULAN I TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

Capaian kinerja Tujuan dan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Tujuan Meningkatnya Produktivitas sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB (ADHK) sektor industri	11,90	-	-
		Pertumbuhan PDRB (ADHK) sektor perdagangan	5,50	-	-
	Meningkatnya Nilai Produktivitas industri	Persentase Peningkatan Nilai produksi sektor industri	2,2%	0,51%	23,18%
	Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan	Persentase peningkatkan omzet sektor perdagangan	2,18%	0,72%	33,03%

II.2 Analisis Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Capaian Tujuan Meningkatnya Produktivitas sektor industri dan perdagangan Dengan Indikator Tujuan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Pengukurannya dilaksanakan di akhir tahun hal ini dikarenakan Data Tersebut dikeluarkan diakhir tahun/ data belum tersedia.

Tujuan Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk adalah Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri dan Perdagangan dengan 2 Sasaran Yaitu :

a. Meningkatnya Nilai Produktivitas industri dengan Indikator sasaran:
   1. Persentase Peningkatan Nilai produksi sektor industri

b. Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan dengan Indikator sasaran

1. Persentase peningkatkan omzet sektor perdagangan

Capaian Kinerja Masing masing Indikator diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Nilai Produktivitas industri dengan Indikator sasaran:

  1. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

     Indikator Kinerja Pertambahan Jumlah Industri kecil dan Menengah menargetkan sebesar 2,2% dan terealisasi sebesar 0,51% dengan Tingkat capaian sebesar 23,18%.

- Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dengan Indikator sasaran :

  1. Persentase Peningkatan omzet sektor perdagangan

     indikator Persentase Peningkatan omzet sektor perdagangan yang menargetkan sebesar 2,18% dan terealisasi sebesar 0,72% dengan Tingkat capaian sebesar 33,03%.

II.3. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan	90%	8%	8,89%
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG	90%	8%	8,89%
	Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	25 Dokumen	2 Dokumen	8%
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat	2 Dokumen	0 Dokumen	0%

	Izin Usaha Toko Swalayan	Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses			
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	Omzet Perdagangan	*1089 Milyar*	*0 Milyar*	0%
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8 unit	0 unit	0%
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 unit	0 unit	0%
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35 Pasar	35 Pasar	100%
	Pembinaan dan Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil	*1 Dokumen*	*0 Dokumen*	0%

	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
3	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	Presentase Kinerja Realisasi Pupuk	96%	30%	31,25%
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota	4 Laporan	1 Laporan	25%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	4 Laporan	1 Laporan	25%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	1 Laporan	50%
	Pengawasan	Jumlah Laporan	4	1	25%

	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	4 Laporan	1 Laporan	25%
4	**Program Pengembangan Ekspor**	Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor	*60%*	0%	0%
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran Dagang dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha ekspor yang di fasilitasi	*12 Pelaku Usaha*	*0 Pelaku Usaha*	0%
	misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	*10 Pelaku Usaha*	*0 Pelaku Usaha*	0%
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	*5 Produk*	*0 Produk*	0%
5	**Program Standarisasi**	Persentase Alat Ukur takar Timbang dan	*85,55%*	*4,09%*	*2,72%*

	dan Perlindungan Konsumen	Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku			
	pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera tera ulang dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan	8555 UTTP	350 UTTP	4,09%
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera tera ulang	Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	8555 Unit	350 Unit	4,09%
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	*750 Orang*	*48 Orang*	6,4%
6	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk	*58,44 %*	*0%*	0%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 UMKM	0 UMKM	0%
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	0 UMKM	0%

7	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun	*57%*	*0%*	*0%*
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	*7 Dokumen*	*0 Dokumen*	*0%*
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	*1 Dokumen*	*0 Dokumen*	*0%*
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	2 Dokumen	0 Dokumen	*0%*
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	*1 Dokumen*	*0 Dokumen*	*0%*
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang	*2 Dokumen*	*0 Dokumen*	*0%*

	Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan			
8	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri	79%	17,95%	22,72%
	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Dokumen	3 Dokumen	9,09%
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	7 Dokumen	3 Dokumen	*42,86%*
9	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	Persentase pengelolaan data dalam SIINas	*25%*	6,24%	24,96%
	Penyediaan informasi	Jumlah DokumenPenyediaan	4 Dokumen	0 Dokumen	0%

	industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan,pengolahan dan analisis data industri , data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
10	**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai SAKIP DISPERINDAG	*85,3*		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	*17 Dokumen*	*13 Dokumen*	*76,47%*

	Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*17 Dokumen*	10 *Dokumen*	58,82%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*4 Laporan*	*1 Laporan*	*25%*
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*4 Dokumen*	*3 Dokumen*	*75%*
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*104 Dokumen*	*33 Dokumen*	*31,73%*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulan	64 orang/bulan	91,43%
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	*60 Dokumen*	26 Dokumen	43,33%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*1 Laporan*	*0 Laporan*	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	25 Laporan	6 Laporan	24%

	Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	*4 Dokumen*	0 *Dokumen*	0%
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	3 Paket	30%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	2 Paket	25%
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	2 Paket	16,7%
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	0 Laporan	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	4 Laporan	0 Laporan	0%

		Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Unit	0 Unit	0%
	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	4 Unit	0 Unit	0%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	25 Unit	0 Unit	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	0 Laporan	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	0 Laporan	0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	0 Laporan	0%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	7 Unit	6 Unit	*85,71%*
	Penyediaan Jasa	jumlah kendaraan	1 Unit	1 Unit	*100%*

	pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	6 Unit	*25%*
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit	0 Unit	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	2 Unit	*10%*
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	18 Laporan	0 Laporan	0%

II.4 Analisis Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
   - Capaian Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan Indikator Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan mentargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 8% dengan Tingkat capaian sebesar 8,89%.
   - Kegiatan penerbitan tanda daftar gudang dengan Indikator Persentase penerbitan TDG yang diterbitkan mentargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 8% dengan Tingkat capaian sebesar 8,89%.

- Sub Kegiatan Fasiitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan Indikator Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan mentargetkan sebesar 25 Dokumen dan terealisasi sebesar 2 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 8%.
- Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan Indikator Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses yang diterbitkan mentargetkan sebesar sebesar 2 Dokumen dan terealisasi sebesar 0 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Indikator Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan mentargetkan sebesar sebesar 2 Dokumen dan terealisasi sebesar 0 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

2. Capaian Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

   Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan diantaranya :

   1. Pembangunan dan pengeolaan sarana distribusi perdagangan
   2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

   - Capaian Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan Indikator omzet perdagangan mentargetkan sebesar 1,089 milyar dan terealisasi sebesar 0 milyar dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
   - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Indikator Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mentargetkan sebesar 8 unit dan terealisasi sebesar 0 unit dengan Tingkat capaian sebesar 0%
   - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Dengan Indikator Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang diterbitkan mentargetkan sebesar 6 unit dan terealisasi sebesar 0 unit dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
   - Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan Indikator Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan mentargetkan sebesar 35 pasar dan terealisasi sebesar 0 pasar dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

- Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan mentargetkan sebesar 1 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%

3. Capaian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
   Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terdiri dari 2 yaitu
   a. Kegiatan yaitu pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan
      1 Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
      2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
      a. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi

Berikut dijelaskan masing masing capaian indikator :

1. Capaian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan Indikator Persentase Pengawasan Harga Pokok mentargetkan sebesar 96% dan terealisasi sebesar 0% dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
2. Capaian Kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota mentargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 1 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 25%.
3. Capaian Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota yang

diterbitkan mentargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 1 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 25%.

4. Capaian sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak daam 1 kabupaten/kota dengan indikator Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota mentargetkan 2 Laporan dan terealisasi 1 laporan dengan tingkat capaian sebesar 50%
5. Capaian Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator jumlah laporan pengawasan penyaluran dan pengunaan Pupuk dan pestisida bersubsidi mentargetkan sebesar 4 Laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%
6. Capaian Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan Indikator Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% yang diterbitkan mentargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%

2 Capaian Program Pengembangan Ekspor dengan indicator Presentase fasiitasi pelaku usaha ekspor menargetkan 60% dan terealisasi sebesar 0% dengan Tingkat capaian sebesar 0%

- Capaian Kegiatan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kabupaten/kota dengan indicator Jumlah pelaku usaha ekspor yang difasilitasi mentargetkan 12 pelaku usaha dan terealisasi sebesar 0 Pelaku usaha dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Capaian sub kegiatan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan dengan indikator jumlah pelaku usaha yang di fasiitasi dalam misi dagang produk unggulan mentargetkan 10 pelaku usaha dan terealisasi sebesar 0 Pelaku usaha dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Capaian sub kegiatan peningkatan citra produk dalam negeri dengan indikator jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosimentargetkan 5 produk dan terealisasi sebesar 0 Pelaku usaha dengan Tingkat capaian sebesar 0%

3 Capaian Program standardisasi dan perlindungan konsumen.

1. Capaian Program standardisasi dan perlindungan konsumen dengan Indikator Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku yang diterbitkan

mentargetkan sebesar 85,55% dan terealisasi sebesar 2,33% dengan Tingkat capaian sebesar 2,72%.

2. Capaian kegiatan Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan dengan Indikator Jumlah Unit Pelaksanaan Metrology Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan mentargetkan sebesar 8555 UTTP dan terealisasi sebesar 199 UTTP dengan Tingkat capaian sebesar 2,33%.
3. Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan Indikator Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang mentargetkan sebesar 8555 unit dan terealisasi sebesar 199 unit dengan Tingkat capaian sebesar 2,33%.
4. Sub kegiatan Pengawasan/penyuluhan metrologi legal dengan Indikator Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina mentargetkan sebesar 750 orang dan terealisasi sebesar 48 orang dengan Tingkat capaian sebesar 6,4%.

4 Capaian Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

1. Capaian program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan Indikator kinerja Persentase Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk mentargetkan sebesar 58,44% dan terealisasi sebesar 0% dengan Tingkat capaian sebesar 0%
2. Capaian Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan Indikator Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri mentargetkan sebesar 100 UMKM dan terealisasi sebesar 0 UMKM dengan Tingkat capaian sebesar 0%
3. Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkatkan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri mentargetkan sebesar 100 UMKM dan terealisasi sebesar 0 UMKM dengan Tingkat capaian sebesar 0%

5 Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri.

1. Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri dengan Indikator Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun mentargetkan sebesar 57% dan terealisasi sebesar 0% dengan Tingkat capaian sebesar 0%
2. Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota yang

diterbitkan mentargetkan sebesar 7 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

3. Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industry dengan indicator jumah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industry mentargertkan 1 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
4. Capaian Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat dengan indikator jumah dokumen hasil Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat mentargertkan 2 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
5. Capaian Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri dengan Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri mentargertkan 1 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
6. Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan mentargertkan 2 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

6 Capaian Program pengendalian izin usaha industri

1. Capaian Program pengendalian izin usaha industri Indikator Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Usaha Industry di SIINas mentargetkan sebesar 79% dan terealisasi sebesar 17,95% dengan Tingkat capaian sebesar 22,72%.
2. Capaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industry (UIU), Izin Perluasan Usaha Indstry (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan menargetkan sebesar 33 Dokumen dan terealisasi sebesar 2 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 6,06%.
3. Capaian Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan

perizinan berusaha berbasis resiko melalui system informasi industry nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA)dengan indikator jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system informasi industry nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA) bagi penanaman modal dalam negeri dengan skala usaha industry kecil dan industry menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menargetkan sebesar 7 Dokumen dan terealisasi sebesar 2 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 28,57%

7 Capaian Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.

1. Capaian program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan Indikator Persentase Pengelolaan Data dalam SIINas menargetkan sebesar 25% dan terealisasi sebesar 6,25% dengan Tingkat capaian sebesar 25%
2. Capaian Kegiatan Penyediaan informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyediaan informasi industry untuk informasi industry IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI Kewenanangan Kabupaten/kota yang diterbitkan menargetkan sebesar 4 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
3. Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis data industry, data kawasan industry serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui system informasi industry nasional (SIINas) dengan Indikator Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas yang diterbitkan menargetkan sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
4. Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industry lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas dengan indicator Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan Perusahaan kawasan industry lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas yang diterbitkan menargetkan sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

8. Capaian Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

   Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 85,30. Untuk Nilai SAKIP pada tribulan II

   Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menargetkan sebesar 17 Dokumen dan terealisasi sebesar 13 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 76,47%

   1. Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan menargetkan sebesar 17 Dokumen dan terealisasi sebesar 10 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 58,82%
   2. Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 1 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 25 %.
   3. Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 3 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 75%
   4. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar 104 dokumen dan terealisasi sebesar 33 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 31,73%
   5. Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN menargetkan sebesar 70 orang dan terealisasi sebesar 64 orang dengan Tingkat capaian sebesar 91,43%.
   6. Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi keuangan SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar 60 dokumen dan terealisasi sebesar 19 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 31,67%
   7. Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 1 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 100%

8. Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar 25 laporan dan terealisasi sebesar 3 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 12%
9. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar 4 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%
10. Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan menargetkan sebesar 10 paket dan terealisasi sebesar 3 paket dengan Tingkat capaian sebesar 30% .
11. Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan Indikator Jumlah Paket bahan logistik yang Disediakan menargetkan sebesar 8 paket dan terealisasi sebesar 2 paket dengan Tingkat capaian sebesar 25%.
12. Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan Penggandaan yang Disediakan menargetkan sebesar 12 paket dan terealisasi sebesar 2 paket dengan Tingkat capaian sebesar 16,7%.
13. Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Indikator Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang Disediakan menargetkan sebesar 12 dokumen dan terealisasi sebesar 3 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 25%
14. Sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu dengan Indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
15. Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

16. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan menargetkan 12 unit dan terrealisasi sebesar 0 Unit tingkat capaian sebesar 0%
17. Sub Kegiatan Pengadaan mebel dengan indikator jumah paket mebel yang disediakan menargetkan 4 unit terrealisasi sebesar 0 unit tingkat capain sebesar 0%
18. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan mentargetkan sejumlah 25 Unit dan terrealisasi sebesar 0 unit tingkat capaian sebesar 0%
19. Kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%
20. Sub Kegiatan penyedia jasa surat menyurat dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%
21. Sub kegiatan penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%
22. Sub Kegiatan penyedia jasa pelayanan umum kantor dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%
23. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan Indikator Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar 7 unit dan terealisasi sebesar 6 unit dengan Tingkat capaian sebesar 85,71%
24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya yang diterbitkan

menargetkan sebesar 1 unit dan terealisasi sebesar 1 unit dengan Tingkat capaian sebesar 100%.

25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan Indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya yang diterbitkan menargetkan sebesar 24 unit dan terealisasi sebesar 6 unit dengan Tingkat capaian sebesar 25%.
26. Sub Kegiatan pemeliharaan mebel dengan Indikator Jumlah mebel yang di pelihara menargetkan sebesar 10 unit dan terealisasi sebesar 0 unit dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
27. Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara menargetkan sebesar 20 unit dan terealisasi sebesar 2 unit dengan Tingkat capaian sebesar 10%
28. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 Dokumen dan terealisasi sebesar 0 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%
29. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Indikator jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD menargetkan sebesar 18 unit dan terealisasi sebesar 0 unit dengan Tingkat capaian sebesar 0%

II.5. realisasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Anggaran	Realisasi	Capaian
1	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan	51.006.000	4.614.607	9,05%

	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG	34.956.000	4.614.607	13,20%
	Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	16.050.000	0	0%
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses	16.050.000	0	0%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	16.050.000	0	0%
2	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	Omzet Perdagangan	5.286.053.000	721.045.846	13,64%
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.012.284.000	698.453.862	13,93%

	Perdagangan				
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5.012.284.000	698.453.862	13,93%
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	273.769.000	22.591.984	8,25%
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	273.769.000	22.591.984	8,25%
3	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	Presentase Kinerja Realisasi Pupuk	132.781.000	4.614.607	*3,48%*
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota	61.031.000	4.614.607	7,56%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan	Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok	36.526.000	4.614.607	12,63%

	barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota			
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	24.505.000	*0*	*0%*
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.750.000	0	*0%*
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	71.750.000	0	*0%*
4	**Program Pengembangan Ekspor**	Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor	86.492.000	0	*0%*
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran Dagang dan Misi dagang bagi produk	Jumlah pelaku usaha ekspor yang di fasilitasi	86.492.000	0	*0%*

	ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	72.850.000	0	*0%*
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	13.642.000	*0*	*0%*
5	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku	246.280.800	14.304.014	*5,81%*
	pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera tera ulang dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan	246.280.800	14.304.014	*5,81%*
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera tera ulang	Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	202.450.800	9.689.407	4,79%

	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	43.830.000	4.614.607	*10,53%*
6	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk	491.673.550	9.229.214	*1,88%*
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	491.673.550	9.229.214	*1,88%*
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	491.673.550	9.229.214	*1,88%*
7	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun	323.355.000	*0*	*0%*
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	323.355.000	*0*	*0%*
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi,	56.220.000	*0*	*0%*

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	103.450.000	0	*0%*
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	127.890.000	0	*0%*
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan	35.795.000	*0*	*0%*
8	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri	63.972.000	6.632.607	10,37%
	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha	Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin	63.972.000	6.632.607	10,37%

	industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	63.972.000	6.632.607	10,37%
9	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	Persentase pengelolaan data dalam SIINas	134.326.000	5.664.607	4,22%
	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah DokumenPenyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	134.326.000	5.664.607	4,22%
	Fasilitasi	Jumlah dokumen	43.536.000	5.664.607	13,01%

	Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	hasil fasilitasi pengumpulan,pengolahan dan analisis data industri , data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas			
	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas	90.790.000	*0*	0%
10	**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		*10.816.299.815*	1.097.790.588	10,15%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.094.590	4.900.000	9,98%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.918.000	4.900.000	12,92%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.754.350	*0*	0%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.422.240	*0*	0%
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.824.089.118	976.066.442	11,06%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.766.213.118	976.066.442	11,06%
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	49.980.000	8.330.000	16,67%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.632.000	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	5.264.000	0	0%

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	952.864.980	17.852.300	1,87%
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8.998.400	1.548.200	17,21%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60.958.180	1.550.600	2,54%
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	635.743.900	2.250.000	0,35%
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6.000.000	1.110.000	18,5%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.062.500	*0*	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	212.102.000	11.393.500	5,37%

	SKPD	dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	321.174.005	*0*	0%
	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	7.200.000	*0*	0%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	313.974.005	*0*	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.239.812	92.452.142	14,26%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	0	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	381.907.812	60.149.895	15,74%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	261.332.000	32.302.247	12,36%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	176.341.200	6.519.704	3,70%

	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan daerah			
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	64.620.000	4.667.792	7,22%
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	79.176.200	1.851.912	2,34%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	4.995.000	0	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27.550.000	0	0%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	6.826.000	0	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	6.826.000	0	0%

II.6 Analisis Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk tahun 2024

1. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
   - Capaian Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan Indikator Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan

ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan mentargetkan sebesar Rp. 51.006.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.614.607 dengan Tingkat capaian sebesar 9,05%.

- Kegiatan penerbitan tanda daftar gudang dengan Indikator Persentase penerbitan TDG yang diterbitkan mentargetkan sebesar Rp. 34.956.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.614.607 dengan Tingkat capaian sebesar 13,20%
- Sub Kegiatan Fasiitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan Indikator Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan mentargetkan sebesar Rp. 16.050.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan Indikator Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses yang diterbitkan mentargetkan sebesar sebesar Rp. 16.050.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Indikator Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan mentargetkan sebesar sebesar Rp. 16.050.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

2. Capaian Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

   Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan diantaranya :

   a. Pembangunan dan pengeolaan sarana distribusi perdagangan
   b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

   - Capaian Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan Indikator omzet perdagangan mentargetkan sebesar Rp. 5.286.053.000 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 721.045.846 dengan Tingkat capaian sebesar 13,64%
   - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Indikator Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mentargetkan sebesar Rp.

5.012.284.000 dan terealisasi sebesar Rp. 698.453.862 dengan Tingkat capaian sebesar 13,93%

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Dengan Indikator Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang diterbitkan mentargetkan sebesar Rp. 5.012.284.000 dan terealisasi sebesar Rp. 698.453.862 dengan Tingkat capaian sebesar 13,93%
- Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan Indikator Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan mentargetkan sebesar Rp. 273.769.000 dan terealisasi sebesar Rp. 22.591.984 dengan Tingkat capaian sebesar 8,25%
- Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan mentargetkan sebesar Rp. 273.769.000 dan terealisasi sebesar Rp. 22.591.984 dengan Tingkat capaian sebesar 8,25%

3. Capaian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

   Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terdiri dari 2 yaitu

   a. Kegiatan yaitu pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan
      1. Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
      2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
   b. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi

   Berikut dijelaskan masing masing capaian indikator :

- Capaian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan Indikator Persentase Pengawasan Harga Pokok mentargetkan sebesar Rp. 132.781.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.614.607 dengan Tingkat capaian sebesar 3,48%.
- Capaian Kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota mentargetkan sebesar

Rp. 61.031.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.614.607 dengan Tingkat capaian sebesar 7,56%.

- Capaian Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota yang diterbitkan mentargetkan sebesar Rp. 36.526.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.614.607 dengan Tingkat capaian sebesar 12,63%
- Capaian sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak daam 1 kabupaten/kota dengan indikator Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota mentargetkan Rp. 24.505.000 dan terealisasi Rp. 0 dengan tingkat capaian sebesar 0%
- Capaian Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator jumlah laporan pengawasan penyaluran dan pengunaan Pupuk dan pestisida bersubsidi mentargetkan sebesar Rp. 71.750.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Capaian Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan Indikator Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% yang diterbitkan mentargetkan Rp. 71.750.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%

4. Capaian Program Pengembangan Ekspor dengan indicator Presentase fasiitasi pelaku usaha ekspor menargetkan Rp. 86.492.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
    - Capaian Kegiatan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kabupaten/kota dengan indicator Jumlah pelaku usaha ekspor yang difasilitasi mentargetkan Rp. 86.492.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
    - Capaian sub kegiatan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan dengan indikator jumlah pelaku usaha yang di fasiitasi dalam misi dagang produk unggulan mentargetkan Rp. 72.850.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
    - Capaian sub kegiatan peningkatan citra produk dalam negeri dengan indikator jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi

materi promosi mentargetkan Rp. 13.642.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%

5. Capaian Program standardisasi dan perlindungan konsumen.
   - Capaian Program standardisasi dan perlindungan konsumen dengan Indikator Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku yang diterbitkan mentargetkan sebesar Rp. 246.280.800 dan terealisasi sebesar Rp. 14.304.014 dengan Tingkat capaian sebesar 5,81%
   - Capaian kegiatan Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan dengan Indikator Jumlah Unit Pelaksanaan Metrology Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan mentargetkan sebesar Rp. 246.280.800 dan terealisasi sebesar Rp. 14.304.014 dengan Tingkat capaian sebesar 5,81%
   - Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan Indikator Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang mentargetkan sebesar Rp. 202.450.800 dan terealisasi sebesar Rp. 9.689.407 dengan Tingkat capaian sebesar 4,79%
   - Sub kegiatan Pengawasan/penyuluhan metrologi legal dengan Indikator Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina mentargetkan sebesar Rp. 43.830.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.614.607 dengan Tingkat capaian sebesar 10,53%
6. Capaian Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
   - Capaian program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan Indikator kinerja Persentase Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk mentargetkan sebesar Rp. 491.673.550 dan terealisasi sebesar Rp. 9.229.214 dengan Tingkat capaian sebesar 1,88%
   - Capaian Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan Indikator Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri mentargetkan sebesar Rp. 491.673.550 dan terealisasi sebesar Rp. 9.229.214 dengan Tingkat capaian sebesar 1,88%
   - Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkatkan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri mentargetkan sebesar sebesar Rp. 491.673.550 dan terealisasi sebesar Rp. 9.229.214 dengan Tingkat capaian sebesar 1,88%
7. Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri.

- Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri dengan Indikator Persentase Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun mentargetkan sebesar Rp. 323.355.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota yang diterbitkan mentargetkan sebesar Rp. 323.355.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industry dengan indicator jumah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industry mentargertkan sebesar Rp. 56.220.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Capaian Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat dengan indikator jumah dokumen hasil Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat mentargertkan Sebesar Rp. 103.450.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Capaian Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri dengan Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri mentargertkan Sebesar Rp. 127.890.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan mentargertkan 35.795.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

8. Capaian Program pengendalian izin usaha industri
   - Capaian Program pengendalian izin usaha industri Indikator Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Usaha Industry di SIINas mentargetkan sebesar Rp. 63.972.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.632.607 dengan Tingkat capaian sebesar 10,37%
   - Capaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industry (UIU), Izin Perluasan Usaha Indstry (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin

Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 63.972.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.632.607 dengan Tingkat capaian sebesar 10,37%

- Capaian Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system informasi industry nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA)dengan indikator jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system informasi industry nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA) bagi penanaman modal dalam negeri dengan skala usaha industry kecil dan industry menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menargetkan sebesar Rp. 63.972.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.632.607 dengan Tingkat capaian sebesar 10,37%

9. Capaian Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.
   - Capaian program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan Indikator Persentase Pengelolaan Data dalam SIINas menargetkan sebesar Rp. 134.326.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.664.607 dengan Tingkat capaian sebesar 4,22%
   - Capaian Kegiatan Penyediaan informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyediaan informasi industry untuk informasi industry IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI Kewenanangan Kabupaten/kota yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 134.326.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.664.607 dengan Tingkat capaian sebesar 4,22%
   - Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis data industry, data kawasan industry serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui system informasi industry nasional (SIINas) dengan Indikator Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 43.536.000 dan

terealisasi sebesar Rp. 5.664.607 dengan Tingkat capaian sebesar 13,01%

- Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industry lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas dengan indicator Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan Perusahaan kawasan industry lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 90.790.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

10. Capaian Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Capaian Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Survei Keputusan Masyarakat menargetkan sebesar Rp 10.816.299.815 dan terealisasi sebesar Rp 1.097.790.588 dengan Tingkat capaian sebesar 10,15%

- Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menargetkan sebesar Rp. 49.094.590 dan terealisasi sebesar Rp. 4.900.000 dengan Tingkat capaian sebesar Rp. 9,98%

- Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan menargetkan sebesar Rp. 37.918.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.900.000 dengan Tingkat capaian sebesar 12,92%
- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menargetkan sebesar Rp. 6.754.350 dan terealisasi sebesar Rp. 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan menargetkan sebesar Rp. 4.422.240 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 8.824.089.118 dan terealisasi sebesar Rp. 976.066.442 dengan Tingkat capaian sebesar 11,06%

- Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN menargetkan sebesar Rp. 8.766.213.118 dan terealisasi sebesar Rp. 976.066.442 dengan Tingkat capaian sebesar 11,06%
- Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi keuangan SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 49.980.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.330.000 dengan Tingkat capaian sebesar 16,67%
- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 2.632.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 5.264.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 952.864.980 dan terealisasi sebesar Rp. 17.852.300 dengan Tingkat capaian sebesar 1,87%
- Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan menargetkan sebesar Rp. 8.998.400 dan terealisasi sebesar Rp. 1.548.200 dengan Tingkat capaian sebesar 17,21%
- Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan Indikator Jumlah Paket bahan logistik yang Disediakan menargetkan sebesar Rp. 60.958.180 dan terealisasi sebesar Rp. 1.550.600 dengan Tingkat capaian sebesar 2,54%
- Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan Penggandaan yang Disediakan menargetkan sebesar Rp. 635.743.900 dan terealisasi sebesar Rp. 2.250.000 dengan Tingkat capaian sebesar 0,35%

- Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Indikator Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang Disediakan menargetkan sebesar Rp. 6.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.110.000 dengan Tingkat capaian sebesar 18,5%
- Sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu dengan Indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu menargetkan sebesar Rp. 29.062.500 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD menargetkan sebesar Rp. 212.102.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.393.500 dengan Tingkat capaian sebesar 5,37%
- Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan menargetkan sebesar Rp. 321.174.005 dan terrealisasi sebesar Rp.0 tingkat capaian sebesar 0%
- Sub Kegiatan Pengadaan mebel dengan indikator jumah paket mebel yang disediakan menargetkan sebesar Rp. 7.200.000 terrealisasi sebesar Rp.0 tingkat capain sebesar 0%
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan mentargetkan sejumlah Rp. 313.974.005 dan terrealisasi sebesar Rp. 0 tingkat capaian sebesar 0%
- Kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 648.239.812 dan terealisasi Rp. 92.452.142 dengan Tingkat capaian sebesar 14,26%
- Sub Kegiatan penyedia jasa surat menyurat dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diterbitkan menargetkan Rp. 5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Sub kegiatan penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 381.907.812 dan terealisasi sebesar Rp 60.149.895 dengan Tingkat capaian sebesar 15,74%
- Sub Kegiatan penyedia jasa pelayanan umum kantor dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di

Sediakan menargetkan sebesar Rp. 261.332.000 dan terealisasi sebesar Rp. 32.302.247 dengan Tingkat capaian sebesar 12,36%

- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan Indikator Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 176.341.200 dan terealisasi sebesar Rp. 6.519.704 dengan Tingkat capaian sebesar 3,70%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 64.620.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.667.792 dengan Tingkat capaian sebesar 7,22%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan Indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 79.176.200 dan terealisasi sebesar Rp. 1.851.912 dengan Tingkat capaian sebesar 2,34%
- Sub Kegiatan pemeliharaan mebel dengan Indikator Jumlah mebel yang di pelihara menargetkan sebesar Rp. 4.995.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara menargetkan sebesar Rp. 27.550.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 6.826.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Indikator jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD menargetkan sebesar Rp. 6.826.000 dan terealisasi sebesar 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Tujuan Meningkatnya Produktivitas sektor industri dan perdagangan		
2	Meningkatnya Nilai Produktivitas industri		
3	Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan		

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**		
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		
	Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang	Perlu adanya penyuluhan dan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha tentang pentingnya Izin Tanda	kurangnya kesadaran pemilik Gudang atau Pelaku Usaha untuk Melakukan Izin Tanda Daftar Gudang

		Daftar Gudang	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		-
2	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		
	Pembinaan dan Pengendalian		

	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
3	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		

4	**Program Pengembangan Ekspor**		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran Dagang dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	Memperkenalkan produk UMKM melalui Pameran - pameran yang di selenggarakan	
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Perlu adanya Sosialisasi kepada Pelaku Usaha terkait Expor	
5	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**		
	pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera tera ulang dan Pengawasan		
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera tera ulang	- melindungi masyarakat dari kecurangan alat ukur yang tidak benar - Memenuhi standar Internasional	- kurangnya kesadaran pemilik UTTP untuk menerakan timbangannya secara berkala - Belum adanya data yang valid pemilik UTTP
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	- Perlu adanya penyuluhan dan Sosialisasi kepada	- kurangnya kesadaran pemilik UTTP untuk

		pemilik UTTP/ Pelaku Usaha tentang pentingnya tera/tera ulang - Meningkatkan perlindungan konsumen	menerakan timbangannya secara berkala - kurangnya pemahaman masyarakat tentang metrologi
6	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri		
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	- Mengikuti Pameran yang di adakan oleh Dekranasda Pusat Maupun Provinsi	
7	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan		

	Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat		
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		
8	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**		
	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko		- Industri besar, menengah dan kecil belum paham tentang persyaratan mengurus legalitas/Perijinan
9	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**		
	Penyediaan informasi		

	industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas		
10	**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen		

	Perencanaan Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	Penyediaan Bahan		

	Logistik Kantor		
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Mebel		
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa		

	pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		
	Pemeliharaan Mebel		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi Renja sampai Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa:

1. Tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sudah selaras dengan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026
2. Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dengan Indikator sasaran:

   1. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

   Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang terdata dalam database direktori industri kecil menengah tahun 2025 sejumlah 1571 Industri kecil menengah. Indikator Kinerja Pertambahan Jumlah Industri kecil dan Menengah menargetkan sebesar 2,2% dan terealisasi sebesar 0,51% dengan Tingkat capaian sebesar 23,18%.
3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dengan Indikator sasaran :
   1. Persentase Peningkatan omzet sektor perdagangan

      indikator Persentase Peningkatan omzet sektor perdagangan yang menargetkan sebesar 2,18% dan terealisasi sebesar 0,72% dengan Tingkat capaian sebesar 33,03%.
4. Capaian realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sampai Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 16.327.769.065,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.863.896.088 tingkat capaian sebesar 11,42%

IV.2. Tindak Lanjut

Terhadap beberapa permasalahan yang ada dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada periode berikutnya, terdapat langkah-langkah perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti, antara lain:

1. Melaksanakan rapat Evaluasi Setiap bulan untuk Meminimalisir hambatan pencapaian kinerja dan anggaran
2. Melaksanakan Kegiatan sesuai anggaran kas yang telah dilaksanakan
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
4. Melaksanakan Pencermatan RKA sebelum ditetapkan Target masing-masing sub kegiatan